

# PERLAWANAN GOLONGAN ISLAM TERHADAP KOLONIALISME BELANDA: KAJIAN POSKOLONIALISME NOVEL PEJUANG-PEJUANG KALI PEPE KARYA DJAMIL SOEHERMAN

Atika Silma Nabila

Program Pascasarjana FIB UGM

atikasilma.as@gmail.com

## Abtrak

Dalam novel *Pejuang-pejuang Kali Pepe* (PpKP) karya Djamil Suherman (DS), kelompok pesantren digambarkan melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dengan memanfaatkan narasi agama Islam. Identitas kolektif digunakan kelompok pesantren untuk membedakan anggota kelompoknya dengan kelompok penjajah sekaligus sebagai upaya mereka untuk mempersatukan anggotanya. Pembacaan novel PpKP melalui studi postkolonialisme dan serangkaian metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa terdapat relasi biner antara kelompok pesantren (self) dan kelompok penjajah (Other). Hubungan oposisional ini direpresentasikan dengan kelompok pesantren sebagai Timur yang tradisional/spiritual, sedangkan kelompok penjajah adalah modern/material. Dalam hubungan yang demikian, kelompok pesantren melakukan resistensi dengan menggunakan narasi self sebagai korban dan pahlawan. Sebaliknya, Other adalah penjajah yang menjadi musuh bersama. Pengetahuan, kepercayaan, atau doktrin-doktrin agama Islam digunakan kelompok pesantren untuk melawan kolonialisme, sehingga muncul istilah-istilah kafir, sabil, syahid, dll. Lahirnya novel ini tidak terlepas dari intensi pengarang sebagai bagian dari kelompok Islam yang merespons diskriminasi Orde Baru terhadap kelompoknya. DS berharap agar kelompok Islam mendapatkan kesempatan yang lebih baik, khususnya dalam bidang politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana identitas agama yang dimanfaatkan kelompok pesantren melawan penjajah dalam novel PpKP.

**Kata kunci:** Self, Other Identitas Kolektif, Politik Identitas, Penindasan, Perlawanan.

## Abstract

*In the novel *Pejuang-pejuang Kali Pepe* (PpKP) by Djamil Suherman (DS), the pesantren group is depicted as fighting against the Dutch colonialism by using Islamic religious narratives. Collective identity is used by the pesantren group to distinguish its group members from the colonial group as well as their efforts to unite their members. The reading of the PpKP novel through the study of postcolonialism and a series of descriptive qualitative methods shows that there is a binary relationship between the pesantren group (self) and the colonial group (Other). This oppositional relationship is represented by the pesantren group as the*

*traditional/spiritual East, while the colonial group is modern/material. In such a relationship, the pesantren group performs resistance by using the narrative of self as a victim and a hero. On the other hand, the Other is a colonialist who becomes a common enemy. Islamic religious knowledge, beliefs, or doctrines are used by pesantren groups to fight colonialism, so that the terms kafir, sabil, syahid, etc. appear. The birth of this novel is inseparable from the author's intention as part of an Islamic group that responded to the New Order's discrimination against his group. DS hopes that Islamic groups will get better opportunities, especially in the political field. The purpose of this study is to explain how the religious identity used by the pesantren group against the invaders in the PPKP novel.*

**Keywords:** *self, Other, collective identity, identity politics, oppression, resistance.*

## A. PENDAHULUAN

Tema mengenai penjajahan Belanda memang banyak mewarnai novel-novel sastra Indonesia. Misalnya pada masa pra-kemerdekaan, perjuangan rakyat dalam melawan Belanda digambarkan dalam *Hikayat Kadiroen* (1920) karya Semaoen. Novel ini mengisahkan perjuangan antar kelas, yaitu proletar menghadapi borjuis. Selain itu, dalam novel-novel tradisi Balai Pustaka, seperti *Siti Nurbaya* (1922) juga digambarkan mengenai perlawanan rakyat Padang terhadap Belanda. Pada masa pasca-kemerdekaan, novel-novel dengan tema penjajahan juga masih diterbitkan. Salah satu yang sering menjadi kajian akademisi adalah *Bumi Manusia* (1980) karya Pramoedya Ananta Toer. Novel yang menceritakan perjuangan bumiputra untuk bersuara serta diskriminasi yang dialami oleh rakyat Jawa ini cukup populer. Dalam kurun waktu yang hampir sama, terbit novel tentang perlawanan kolonialisme di Hindia Belanda yang ditulis oleh Djamil Soeherman (DS). Salah satu novel DS, *Pejuang-pejuang Kali Pepe (PpKP)* memuat cerita tentang masyarakat pesantren desa Gedangan yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan dalam novel-novel DS digambarkan beridentitas Islam, khususnya Islam yang tumbuh di pedesaan Jawa. DS memang dikenal sebagai pengarang keagamaan dan *PpKP* adalah novel pertamanya yang membahas perjuangan melawan Belanda. Selain itu, sebagai pelopor karya bertema pesantren, *PpKP* menjadi novel awal yang menggambarkan perlawanan kelompok pesantren terhadap kolonialisme Belanda.

Di nusantara, narasi agama tidak dapat dipisahkan dengan perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam catatan sejarah, kelompok Islam memanfaatkan Ideologi Islam sebagai kekuatan sosial yang besar dalam melawan kekuasaan asing. Perlawanan besar seperti perang Padri dan perang Aceh hingga perlawanan kecil seperti pemberontakan petani di Cilegon dan Cimere dipimpin oleh pemuka

Islam dan dijiwai oleh ideologi Islam<sup>1</sup>. Pergerakan-pergerakan berbasis agama Islam terus terjadi, begitu juga dengan berdirinya organisasi yang berlandaskan agama Islam seperti Sarekat Islam. Hal itu menunjukkan bahwa ideologi Islam berperan dalam menggerakkan rakyat, terutama di daerah pedesaan di mana kegelisahan sosial memberi suasana baik bagi pergolakan dan pemberontakan.<sup>2</sup>

Orang-orang yang memberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki identitas kolektif. Identitas bersama tersebut mampu mengikat rasa persatuan antar anggotanya sekaligus mengidentifikasi pihak lawan sebagai liyan. Liyan berarti bukan diri, yaitu orang lain yang berbeda dengan dirinya. Ini menunjukkan bahwa identitas diri selalu berhubungan dengan *the Other*. Perbedaan diri dengan liyan menunjukkan bahwa identitas hanya mungkin terbangun di dalam dan melalui perbedaan<sup>3</sup>. Sarup<sup>4</sup> menyatakan bahwa setiap kelompok minoritas yang berhadapan dengan permusuhan akan bereaksi dengan mempererat ikatan kultural mereka untuk menunjukkan garda persatuan melawan penindas. Kelompok tersebut memperoleh kekuatan dengan menonjolkan identitas kolektifnya. Mereka melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari kelompok dominan dengan cara memvalidasi budaya milik mereka sendiri (agama, bahasa, nilai-nilai, pandangan hidup). Hal tersebut lebih jauh dijelaskan dalam studi orientalisme yang mengonstruksi dunia ke dalam dua dunia, yaitu Barat dan Timur. Menurut Said<sup>5</sup>, orientalisme beroperasi dalam ruang-ruang identitas yang mengonstruksi Timur sebagai “yang lain”, “*Others*”, “*Liyan*” bagi Barat. Dalam konstruksi ini terdapat implikasi untuk mengunggulkan kebudayaan “kita” lebih superior dari kebudayaan “mereka”. Hal ini berdampak pada terciptanya batas-batas tegas antara mereka (Timur) dan kita (Barat). Tanda superioritas Atlantik-Eropa terhadap dunia Timur memuat relasi kekuasaan, dominasi, dan hegemoni yang kompleks.

Dalam *PpKP*, perlawanan terhadap kolonial oleh penduduk pesantren dan warga Gedangan digerakkan oleh narasi identitas mengenai agama. Mereka melawan pihak penjajah dengan semangat berperang terhadap orang kafir yang merenggut hak-hak mereka. Meskipun perlawanan tersebut bertujuan sebagai usaha pembebasan, namun narasi perlawanan yang dibangun menunjukkan

<sup>1</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 73.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>3</sup> Madan Sarup, *Identity, Culture and the Postmodern World* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996), 47.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>5</sup> Edward W Said dan Achmad Fawaid, *Orientalisme: Mengugat Hagemoni Barat dan menduduki Timur sebagai subjek* (Pustaka Pelajar, 2010).

adanya bias. Perlawanan terhadap penjajah dilakukan melalui legitimasi agama dengan melakukan *othering* terhadap pihak penjajah dengan menyebutnya kafir. Meskipun masalah yang terjadi adalah perampasan tanah, tetapi untuk melawan kelompok lain mereka menggunakan narasi kepercayaan. Artinya, kelompok terjajah memosisikan dirinya berbeda dengan kelompok penjajah berdasarkan afiliasi keagamaan. Meskipun identitas keagamaan, yaitu Islam digunakan sebagai alat politik yang efektif untuk menggalang persatuan anggota kelompok sekaligus menyerang musuh, namun hal ini memunculkan bias.

Pengetahuan agama merupakan konstruksi, sehingga memiliki kemungkinan untuk dipolitisasi. Edward Said dalam *Orientalisme* menyebutkan tentang ilmu pengetahuan politis. Menurutnya, tidak ada seorang cendekiawan pun yang mampu membebaskan diri dari lingkungan kehidupannya, dari fakta keterlibatannya (baik sadar maupun tidak) dengan suatu kelompok, dari seperangkat keyakinan, kedudukan sosial, ataupun sekedar aktivitasnya sebagai anggota masyarakat<sup>6</sup>. Hal ini juga terjadi pada pengarang atau penyair yang tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya, termasuk pengetahuan mengenai kepercayaan atau agamanya. Selain ideologi, lingkungan sosial dan politik juga tidak bisa terlepas dari pengarang dan karyanya. Dalam kasus ini, masa terbitnya novel *PpKP* bersamaan dengan pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Novel ini tidak terlepas dari bagaimana pengarang menanggapi kondisi pemerintahan saat itu yang tidak terlalu menguntungkan kelompok Islam. Mereka kurang mendapat tempat dalam politik pemerintahan. Sebaliknya, pihak militer memiliki kekuasaan yang besar dalam pemerintahan.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti *PpKP* karena *pertama*, novel ini merupakan novel awal yang menceritakan perjuangan perlawanan penjajah Belanda oleh kelompok pesantren. *Kedua*, perlawanan menggunakan identitas agama memungkinkan adanya bias. *Ketiga*, latar belakang lahirnya *PpKP* berhubungan dengan situasi politik saat itu.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan analisis lebih mendalam mengenai novel *PpKP* melalui perspektif poskolonialisme, termasuk hubungan karya tersebut dengan situasi politik di masa penciptaannya. Secara umum, teori poskolonial dapat memperluas jangkauan pemahaman mengenai dampak dari imperialisme terhadap agama, serta berkontribusi terhadap bagaimana pemahaman para penganut mempraktikkan dan merespons aturan imperial. Teori poskolonial juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi cara bagaimana agama berubah dan bergerak terus-menerus, bahkan ketika para penjajah tidak lagi ada. Teori poskolonial tidak hanya berkontribusi terhadap pemahaman baru

---

<sup>6</sup> Ibid., 14.

tentang sejarah dan pengetahuan agama selama masa kolonial, tetapi juga dalam konteks poskolonial<sup>7</sup>.

Dengan demikian, melihat adanya permasalahan poskolonial mengenai identitas agama sebagai upaya perlawanan, peneliti hendak membahas tiga hal, yaitu representasi identitas Islam dan identitas penjajah dalam novel, wacana agama sebagai resistensi muslim terhadap penjajah, dan wacana yang melatarbelakangi penulisan novel tersebut.

## B. REPRESENTASI DIRI DAN LIYAN DALAM NOVEL *PPKP*

Pada dasarnya untuk mengetahui tokoh-tokoh yang merepresentasikan kelompok pesantren, perlu diketahui apa yang menjadi persamaan antar tokohnya, serta apa yang membedakannya dengan kelompok lain. Untuk mendefinisikan *self*, diperlukan *Other* yang merepresentasikan perbedaan dan pertentangan dengan kelompok pesantren (*self*).

Di dalam novel *PpKP*, *self* diidentifikasi sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam agama Islam, sedangkan *Other* adalah kelompok yang dianggap tidak dekat dengan agama Islam, kurang memiliki otoritas keagamaan, atau bertentangan dengan Islam. Seorang anggota mengidentifikasi dirinya dengan anggota lain di dalam kelompok pesantren melalui identitas kolektif, yaitu agama. Identitas kolektif inilah yang tidak dimiliki oleh *Other*. Hubungan *self* dan *Other* antarkelompok di sini menimbulkan posisi yang oposisional, hierarkis, dan dominatif.

Dalam novel *PpKP*, identitas diri atau *self* diwakili oleh tokoh-tokoh pesantren. Kelompok ini dihadapkan dengan identitas yang lain atau *Other*, yakni tokoh-tokoh yang berada di luar pesantren, yaitu kelompok penjajah. Kelompok pesantren adalah tokoh-tokoh yang hidup di dalam pesantren serta pihak-pihak yang mendukung pesantren. Tokoh-tokoh tersebut adalah Kiyahi Mukmin, keluarganya, santri-santri, dan masyarakat Gedangan. Mereka direpresentasikan sebagai orang-orang muslim yang taat beragama. Sebaliknya, tokoh-tokoh penjajah atau *Other* adalah lurah, camat, polisi, hingga kompeni. Mereka tidak digambarkan memiliki identitas Islam seperti halnya penggambaran kelompok pesantren.

Karena terbatasnya ruang, tulisan ini hanya akan menjelaskan satu tokoh pesantren yang memiliki kontribusi terhadap tokoh lain. Salah satu tokoh utama di pesantren yang memiliki peran penting adalah Kiyahi Mukmin. Kiai adalah

---

<sup>7</sup> Goulet Nicole, "Study of Religion: Dissecting Orientalism, Nationalism, and Gender Using Postcolonial Theory," *Religion Compass* 5, no. 10 (2011).

pemimpin pesantren dan tokoh spiritual di masyarakat. Tokoh ini dituakan dan dihormati oleh anggota kelompoknya, sehingga pendapat dan pengetahuannya sangat berpengaruh terhadap orang lain. Dari peran dominan kiai, kelompok pesantren digambarkan memiliki hubungan yang hierarkis dan dominatif. Kiyahi Mukmin juga dianggap sebagai guru yang mengajarkan ilmu agama kepada para santri dan penduduk Gedangan. Pengetahuan agama yang dimiliki Kiyahi Mukmin dianggap memiliki otoritas keilmuan sehingga petuah dan keputusannya dianggap berpengaruh dan menjadi rujukan orang-orang. Menjadi pemimpin spiritual ternyata memberi dampak yang besar karena ia tidak hanya berperan dalam ranah agama, tetapi juga menyangkut aspek lain, seperti sosial dan politik. Hal ini membuat suara Kiyahi Mukmin memiliki kekuatan untuk menggerakkan massa. Masyarakat menganggap Kiyahi Mukmin dan pesantren memberikan pengayoman dan perlindungan bagi mereka.

Dari segi otoritas keilmuan agama, kiai menempati posisi tertinggi di dalam kehidupan masyarakat pesantren. Dengan menempati posisi tinggi, ia dipercaya sebagai pemuka agama, sumber keilmuan, serta berpengaruh besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan pesantren (dan masyarakat sekitar), termasuk pengambilan keputusan mengenai masalah sosial. Dalam masyarakat pesantren, semakin tinggi ilmu agama seseorang semakin tinggi pula kedudukan hierarkis seseorang sehingga ia mendapatkan kepercayaan masyarakat. Penggambaran karakter Kiyahi Mukmin sebagai pemimpin masyarakat adalah usaha penulis untuk menunjukkan adanya dominasi agama di dalam masyarakat tersebut. Agama memberi dampak di segala kehidupan, termasuk juga kehidupan sosial. Oleh karena itu, suara kiai yang dianggap mewakili pengetahuan tentang agama pada akhirnya dipercaya sebagai suara kebenaran dan berpengaruh besar bagi masyarakat.

Hubungan darah atau keluarga juga menjadi hal yang penting dalam kepemimpinan pesantren. Posisi Kiyahi Mukmin dalam pesantren dan masyarakat memiliki otoritas yang kuat karena ia adalah putra dari pemimpin pesantren terdahulu. Garis keluarga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam masalah posisi pemimpin di pesantren. Di samping hal tersebut, keluarga kiai juga digambarkan mendapat penghormatan dan perlakuan yang khusus dari tokoh-tokoh lain.

Meskipun warga Gedangan menganggap pesantren sebagai kiblat keagamaan, tetapi tidak semua penduduk desa Gedangan dekat dan memiliki hubungan yang baik dengan pesantren. Mereka yang tidak dekat dengan pesantren digambarkan sebagai orang yang awam terhadap ajaran agama Islam. Oleh karena itu mereka digambarkan memiliki perangai yang kurang baik menurut pandangan agama, misalnya minum minuman keras, bermain perempuan, berkelahi, dll. Oleh karena itu, penduduk tersebut dianggap jauh dari nilai-nilai agama Islam. Mereka

adalah objek dakwah bagi kalangan pesantren. Karena dianggap kelompok yang tidak dekat dengan pesantren sekaligus ajaran agama Islam, para santri berpikir bahwa tugas merekalah untuk mengajak orang-orang tersebut kembali ke jalan yang benar. Meskipun memiliki hubungan yang kurang dekat, tetapi hubungan pesantren dengan penduduk awam tersebut tidak memiliki masalah. Dari uraian tersebut tampak bahwa penulis ingin menunjukkan kelompok pesantren tidak menutup diri dari kelompok yang berbeda dengannya, selama tidak terjadi konfrontasi di antara mereka. Namun demikian, batasan-batasan dalam agama membuattimbulnya segregasi dalam masyarakat Gedangan.

Untuk menunjukkan siapa *self*, diperlukan penanda identitas tertentu yang membedakannya dengan *Other*. Dengan kata lain, *Other* bukanlah *self* karena tidak memiliki sesuatu yang dimiliki *self*. Untuk itulah penulis novel *PpKP* menggambarkan *self* melalui identitas kolektif sebagai pembeda antara diri dengan liyan. Identitas kolektif ini menjadi pilihan kesadaran yang eksplisit bagi sekelompok orang yang tidak ingin terintegrasi dengan kelompok dominan dengan memvalidasi budaya mereka sendiri (agama, bahasa, nilai-nilai, cara hidup)<sup>8</sup>.

Dalam novel ini, ikatan kultural yang menyatukan anggota-anggotanya adalah agama. Agama Islam menjadi identitas milik kelompok pesantren yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya, sehingga agama Islam digunakan sebagai upaya untuk membedakan identitas kelompok mereka (diri) dengan kelompok yang lain (Liyen). Agama Islam menjadi identitas kultural bagi kelompok pesantren dengan identifikasi agama Islam sebagai kepercayaan, ritual atau ibadah, pengajaran dan dakwah, nilai-nilai, situs-situs agama, dan tradisi atau seremonial.

Agama Islam menjadi kepercayaan bersama kelompok pesantren. Kepercayaan mereka pada Allah memberi dampak pada bagaimana tokoh-tokohnya menjalani kehidupan. Hal ini tampak pada perilaku, keputusan, ataupun pilihan-pilihan hidup mereka tidak terlepas dari agama Islam. Islam menjadi tujuan, sehingga Islam adalah prioritas bagi hidup tokoh-tokoh dalam kelompok pesantren. Mereka menyadari dan meyakini bahwa orientasi hidupnya adalah kehidupan setelah di dunia (saat ini). Mereka percaya perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan dan dibalas di akhirat.

Sebagaimana idealnya orang muslim, mereka melakukan perintah-perintah yang dianjurkan dalam agama Islam dan menjauhi larangan-larangan tertentu, seperti mabuk atau judi. Dalam agama Islam, Tuhan memerintahkan penganutnya

<sup>8</sup> Sarup, *Identity, Culture and the Postmodern World*, 3.

untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Hal ini menjadi pengetahuan bersama bagi umat Islam. Hal-hal yang perlu dilakukan umat muslim misalnya ibadah atau ritual seperti melakukan salat dan membaca Qur'an. Selain itu, ajaran-ajaran moral juga dilakukan umat Islam seperti harus berbuat baik pada orang lain, menolong sesama, menghormati orang tua, dll. Dalam novel *PpKP*, situasi pesantren digambarkan kental dengan ajaran-ajaran agama Islam. Santri-santri melakukan ibadah secara tertib di pesantren. Mereka salat bersama di masjid, membaca Quran, memperingati hari-hari besar agama Islam dll.

Pesantren juga menjadi pusat kegiatan pengajaran dan pembelajaran agama Islam. Pengetahuan mengenai Islam diajarkan, terutama oleh Kiyahi Mukmin kepada santri-santri dan warga Gedangan. Pengetahuan Islam dibutuhkan sebagai dasar bagi penganutnya menjalani kehidupan keagamaan dan aspek kehidupan yang lain.

Pesantren sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ajaran agama Islam menunjukkan adanya dominasi pengetahuan. Kelompok pesantren yang menyebarkan dakwah agama Islam dipandang membawa suara agama. Bagi umat muslim, agama adalah kebenaran. Dengan demikian, suara pesantren adalah suara kebenaran. Warga Gedangan memandang pesantren sebagai suara kebenaran sehingga mereka patuh dan setuju terhadap keputusan dan pendapat (orang-orang) pesantren.

Kelompok pesantren juga menganut nilai-nilai atau aturan-aturan ajaran agama. Nilai-nilai dan aturan tersebut menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga hal tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku. Aturan-aturan ini dijalani tokoh-tokohnya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menggolongkan mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Orang yang dianggap baik adalah orang yang menjadi kelompok mereka. Dalam novel *PpKP*, penulis menggambarkan bermacam-macam aturan, misalnya mengenai pergaulan lawan jenis, penghormatan terhadap guru, berbuat baik pada sesama, dll. Tokoh-tokoh dalam kelompok pesantren umumnya digambarkan sebagai muslim yang mematuhi nilai-nilai ajaran agama Islam dengan baik. Penggambaran kelompok pesantren yang mematuhi aturan dan nilai-nilai agama menunjukkan mereka adalah kelompok muslim yang baik menurut sudut pandang agama Islam. Dengan demikian, identitas kelompok pesantren sebagai *Self* adalah representasi muslim yang baik.

Seremoni atau peringatan hari-hari besar Islam juga menjadi identitas kolektif rakyat Gedangan. Dalam novel *PpKP*, penduduk Gedangan digambarkan merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan suka cita. Hari ini dianggap penting

karena pada hari ini seorang utusan Tuhan dalam menyebarkan agama Islam lahir. Tradisi lain yang digambarkan dalam novel *PpKP* adalah silat. Silat menjadi salah satu tradisi yang dilestarikan oleh kelompok pesantren. Ilmu bela diri ini dianggap sebagai ilmu pelengkap setelah belajar ilmu agama. Di pesantren, jago-jago silat lahir dari tradisi pesantren yang turun temurun. Meskipun bukan berasal dari ajaran agama, mereka menyadari bahwa tradisi tersebut dijalankan atau dipraktikkan sesuai dengan ajaran Islam, misalnya kesadaran bahwa bela diri silat yang mereka miliki merupakan karunia Tuhan. Dengan mengamalkan tradisi-tradisi tersebut, tampak bahwa tokoh-tokoh di desa Gedangan digambarkan hidup dengan tradisi agama yang kental. Mereka merasa memiliki tradisi bersama yang dianggap berarti dan penting. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan penulis untuk mereduksi identitas kolektif masyarakat yang mungkin saja beragam menjadi berfokus pada tradisi agama Islam.

Kompleks pesantren, termasuk masjid dan makam leluhur menjadi penanda identitas kultural yang penting. Pesantren bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal kiai dan santri, tetapi juga sebagai pusat belajar-mengajar agama Islam. Masjid memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Selain menjadi tempat menjalankan ritual ibadah keagamaan seperti shalat, masjid juga menjadi tempat berkumpul penduduk Gedangan, seperti saat melakukan musyawarah. Makam leluhur juga dinilai menjadi hal yang penting dalam aspek historis. Hal ini ditunjukkan dari alasan kelompok ini menolak digusur karena makam leluhur yang tidak mungkin dipindahkan. Makam leluhur dianggap penting karena pihak pesantren tidak ingin kehilangan sejarah genealogis dan akar keluarga pesantren.

Identifikasi-identifikasi pesantren yang digambarkan oleh penulis menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan mereka didasarkan pada agama Islam. Agama Islam menjadi pemersatu sekaligus inti kehidupan masyarakat pesantren, sehingga hal-hal yang dianggap berkaitan dengan agama Islam menjadi hal yang penting bagi mereka. Persamaan-persamaan yang termuat dalam identitas kolektif anggota kelompok pesantren tersebut menjadi pembeda dari identitas kelompok lain. Selain identitas keagamaan yang sama, kelas sosial dan ekonomi orang-orang di desa Gedangan juga digambarkan seragam. Profesi mereka secara umum adalah petani dan buruh pabrik. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kelas ekonomi masyarakat Gedangan adalah kelas bawah.

Identitas kultural yang telah diuraikan di atas menjadi identitas kolektif yang ditekankan kelompok pesantren untuk membedakan dirinya dengan kelompok yang lain. Tampak bahwa di dalam novel *PpKP*, identitas kultural dianggap sebagai akar yang diharapkan dapat memperbarui kebanggaan atas identitas mereka. Penulis berusaha menunjukkan orisinalitas identitasnya sebagai muslim melalui representasi kelompok pesantren. Dengan memiliki identitas yang

berbeda dengan kelompok lainnya, anggota kelompok pesantren saling memiliki ikatan bersama yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kelompok lain, yaitu penjajah tidak digambarkan memiliki ikatan kultural seperti kelompok pesantren. Tokoh-tokoh dalam kelompok penjajah tidak digambarkan memiliki keimanan, tradisi, ataupun nilai-nilai yang dimiliki kelompok pesantren. Karena kelompok penjajah tidak memiliki ikatan kultural yang sama, mereka menjadi *Other*. Kelompok ini bukan menjadi bagian pesantren, ada di luar pesantren, bahkan bertentangan dengan pesantren.

Kelompok penjajah ditempatkan sebagai Liyan, yaitu orang-orang yang berada di luar kelompok pesantren. Mereka adalah orang-orang yang mendukung rencana penggusuran tanah penduduk Gedangan dan pesantren. Dengan demikian, posisi mereka berlawanan dengan kelompok pesantren. Dari apa yang diuraikan penulis, tujuan kedatangan Belanda di desa Gedangan adalah pembangunan. Tampak bahwa Belanda mengutamakan kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan kepentingan penduduk desa. Meskipun kebijakan Belanda mengarah pada tujuan modernisasi serta ekonomi, namun upaya ini dianggap merugikan masyarakat Gedangan. Warga Gedangan menjadi kehilangan tanah dan tempat tinggalnya demi pembangunan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penindasan terhadap penduduk desa Gedangan oleh pemerintah.

Bukan hanya orang-orang Belanda saja yang menjajah penduduk desa Gedangan, elite-elite pemerintahan daerah juga menjadi bagian dari kelompok penjajah. Dalam kelompok ini digambarkan adanya hubungan hierarkis antar anggotanya. Tokoh yang menduduki jabatan yang tinggi memiliki kekuasaan yang lebih kuat daripada tokoh dengan posisi jabatan yang lebih rendah. Oleh karena itu, tokoh dengan posisi tinggi lebih ditakuti dan memiliki otoritas dalam pemerintahan. Otoritas tersebut mengarah pada tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan ketakutan pada penduduk.

Kedatangan Belanda ternyata menimbulkan kategori lain yang mengelompokkan masyarakat desa Gedangan. Pada kelompok pesantren sebelumnya, pembagian kelompok penduduk desa Gedangan diakibatkan karena ketaatan dan pengetahuan tokoh-tokohnya pada agama. Namun, kedatangan Belanda menimbulkan pembagian kelompok berdasarkan sisi politik. Meskipun mayoritas orang-orang Gedangan mendukung pesantren melawan Belanda, namun beberapa orang Gedangan yang bekerja di pemerintahan mendukung Belanda.

Dari penggambaran mengenai kelompok penjajah di dalam novel ini, identifikasi identitas mutual seperti yang terjadi di dalam kelompok pesantren tidak terdapat dalam kelompok ini. Mereka tidak digambarkan berperan dalam

aktivitas keagamaan seperti menjalani ritual, tradisi, atau nilai-nilai yang dilakukan oleh kelompok pesantren. Dengan tidak digambarkan identitas para elite lokal tersebut, mereka 'lebih mudah' digolongkan sebagai kelompok di luar kelompok pesantren.

Penamaan tokoh-tokoh di dalam novel juga menunjukkan adanya perbedaan identitas di kedua kelompok. Tokoh-tokoh di pesantren dinamai dengan nama-nama Arab, misalnya bernama Muhammad, Salim, Syafii, Latifah, Zainab, dll. Nama dengan bahasa Arab menjadi representasi orang Islam karena agama Islam yang dibawa nabi Muhammad berasal Makkah yang masyarakatnya berbahasa Arab. Bahasa Arab bagi umat Islam adalah bahasa yang muliaka karena Islam lahir di tanah Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa sumber hukum agama Islam. Selain itu, bahwa Arab menjadi bahasa dalam kitab suci Quran dan ibadah khusus umat muslim menggunakan bahasa Arab.

Sebaliknya, tokoh-tokoh di luar kelompok pesantren dinamai dengan kedudukan atau profesinya, misalnya lurah, tukang pedati, atau polisi. Dari segi penamaan, penulis terlihat memosisikan tokoh-tokoh yang ada di dalam dua kelompok tersebut secara berbeda. Tokoh-tokoh pesantren diidentifikasi dengan nama Islami, sedangkan tokoh-tokoh di luar pesantren diidentifikasi dengan profesi atau jabatan. Nama-nama tokoh dalam kelompok pesantren dibuat secara khusus menunjukkan bahwa nama menjadi identitas kelompok yang penting, sedangkan kelompok liyan atau penjajah anonim. Nama menjadi tidak penting bagi kelompok tersebut karena tokoh hanya dilihat berdasarkan kekuatan atau posisi politisnya. Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa tokoh liyan tidak atau kurang bernilai kemanusiaannya. Mereka cenderung digambarkan hanya dari sisi fungsionalnya saja. Identitas sebagai manusia unik yang biasanya ditandai melalui nama tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam kelompok penjajah.

Secara umum, representasi antara tokoh-tokoh kelompok pesantren dan kelompok penjajah di dalam novel *PpKP* menunjukkan relasi oposisi biner. Dalam novel *PpKP* digambarkan *Self* dan *Other* yang diwakili oleh kelompok pesantren dan penjajah. *Self* yang direpresentasikan oleh kelompok pesantren menjadikan agama berfungsi sebagai identitas yang membedakan kelompoknya dengan kelompok lain. Identitas agama menjadi identitas otentik yang membedakannya dengan penjajah. Di sisi lain, penjajah adalah *Other* yang diidentifikasi sebagai kelompok di luar pesantren yang menjadi musuh bersama. Dalam novel ini, polarisasi reduktif Islam melawan Barat masih kuat.

Secara keseluruhan, penggambaran yang dilakukan oleh pengarang novel *PpKP* adalah oposisi dasar dalam wacana kolonial yang menggambarkan Timur sebagai alam spiritual, sedangkan Barat sebagai alam material. Timur

tradisional adalah pesantren dan Barat modern adalah penjajah. Alam spiritual direpresentasikan pesantren melalui gambaran mengenai kepercayaan, tradisi, atau pun nilai-nilai agama Islam. Sebaliknya, kelompok penjajah digambarkan sebagai pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan yang berhubungan dengan materi.

Meskipun relasi penjajah dan kelompok pesantren dalam novel *PpKP* cenderung digambarkan saling beroposisi, namun di luar novel, wacana mengenai hubungan penjajah dan terjajah tidak terbatas pada relasi yang saling berlawanan saja. Representasi kelompok pesantren di dalam novel dilekatkan pada kaum tradisional, sedangkan kelompok penjajah diidentikkan dengan kaum modern. Namun, narasi hubungan antara kelompok Islam dengan kelompok penjajah di luar novel berlangsung secara dinamis. Tidak hanya oposisi biner, hubungan kedua belah pihak lebih beragam. Hal itu misalnya dapat dilihat dari pandangan kelompok organisasi muslim atau tokoh agama Islam yang melihat modernitas yang diidentikkan dengan kelompok penjajah dengan cara yang netral, patuh, atau bahkan berpikap pada Belanda.

Hubungan kelompok Islam dan penjajah tidaklah selalu hitam putih dan bertentangan. Terdapat upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk menjalin hubungan memerintah-diperintah yang diharapkan dapat diterima keduanya. Hal ini dapat berubah jika terjadi diskriminasi dan intervensi. Misalnya saja organisasi Muhammadiyah tidak melakukan konfrontasi langsung dengan pemerintahan Belanda. Sebaliknya, organisasi tersebut cukup akomodatif dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda seperti meminta perizinan saat melakukan kegiatan. Selain itu, mereka juga mengadopsi sistem organisasi kolonial seperti pendirian sekolah, rumahsakit, yayasan, dll. Selain Muhammadiyah, organisasi NU yang dikenal sebagai organisasi tradisional juga tidak anti terhadap modernisme. Mereka juga mendirikan sekolah ataupun panti asuhan. Sementara itu, dalam novel *PpKP*, hubungan antara pemerintahan kolonial dengan rakyat jajahannya yang saling berhadapan juga terjadi karena adanya diskriminasi dan intervensi dalam kehidupan masyarakat Gedangan. Desa Gedangan memiliki kehidupan yang damai sebelumnya, meskipun berada di bawah pemerintahan Belanda. Namun, kehidupan mereka berubah ketika terjadi intervensi dan diskriminasi oleh pemerintah Belanda. Peristiwa ini membuat hubungan antara penduduk dan penjajah menjadi bertentangan.<sup>9</sup>

Interaksi antara penjajah dan terjajah di dalam novel *PpKP* yang cenderung

---

<sup>9</sup> Muhamad Ali, "Islam dan Penjajahan Barat: Sejarah Muslim dan Kolonialis-Eropa-Kristen, Modernisasi Sistem Organisasi, Politik, Hukum, Pendidikan di Indonesia dan Melayu," *Jakarta: Penerbit Serambi*, 2017.

digambarkan saling bertentangan menunjukkan adanya reduksi atas beragamnya wacana mengenai hubungan Belanda dengan kelompok Islam. Tidak adanya alternatif penggambaran hubungan kelompok Islam dengan penjajah selain oposisi biner dalam novel tersebut menunjukkan bahwa pengarang terjebak dalam pandangan Orientalis. Pandangan pengarang mengenai *Self* dan *Other* sangat dominan, sehingga kedua kelompok digambarkan dengan posisi saling berhadapan.

### C. WACANA AGAMA ISLAM SEBAGAI RESISTENSI MELAWAN PENJAJAH

Selain sebagai pembeda antara ‘diri dan ‘Liyan’, identitas agama juga digunakan sebagai narasi perlawanan kelompok pesantren terhadap penjajah. Dengan kata lain, agama menjadi politik identitas bagikelompok pesantren untuk melawan penindasan. Politik identitas adalah pengelompokan yang dilakukan secara politik dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum terpinggir dan tertindas. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai wacana agama yang digunakan kelompok pesantren sebagai upaya resistensi terhadap kelompok penjajah.

Perlawanan kelompok pesantren bukanlah tindakan yang muncul tanpa adanya sebab. Kelompok pesantren merasakan adanya penindasan akibat datangnya penjajah di desa Gedangan. Mereka merasa mendapatkan ketidakadilan dari tindakan kolonial yang dilakukan oleh penjajah. Hubungan yang tidak setara ini menimbulkan narasi mengenai kelompokpenjajah sebagai musuh, sedangkan kelompok pesantren sebagai korban. Selain itu, terdapat narasi lain mengenai kelompok pesantren sebagai pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap penindasan. Narasi-narasi secara keseluruhan yang dibangun oleh penulis tidak terlepas dari oposisi biner, terutama kaitannya dengan identitas keagamaan.

Kelompok penjajah dinarasikan sebagai pihak yang melakukan kejahatan dan menimbulkan ancaman bagi kelompok pesantren. Kelompok ini melakukan tindakan kolonial dan penindasan, yaitu merampas rumah dan tanah milik penduduk Gedangan. Selain itu, kelompok penjajah juga berupaya menyita tanah dan bangunan milik pesantren, termasuk tanah leluhur. Mereka juga melakukan tindak kekerasan pada penduduk Gedangan yang menolak penggusuran. Tindakan kekerasan dan penindasan yang digambarkan dalam novel *PpKP* menunjukkan bahwa kelompok penjajah adalah musuh bersama yang perlu untuk dilawan. Apalagi setelah terbunuhnya seorang santri, kelompok pesantren semakin membulatkan tekad melakukan perlawanan. Mereka merasa jika tindak kekerasan terus dibiarkan, kelompokpenjajah bisa semakin mengancam kehidupan mereka.

Citra mengenai kelompok penjajah sebagai pihak yang jahat dan berbahaya

telah berkembang di masyarakat Gedangan. Cerita mengenai keseraman penjajah telah tersebar dari satu orang ke orang lain dalam berbagai kalangan usia. Kelompok penjajah dikenal sebagai orang-orang yang angkuh dan bersikap sewenang-wenang terhadap pribumi. Selain itu juga para kompeni dan polisi yang mematai-matai kegiatan penduduk, serta kekejaman yang terjadi di dalam bui. Cerita yang demikian menjadi sangat efektif untuk menimbulkan kewaspadaan terhadap kelompok penjajah. Pandangan mengenai kelompok penjajah itu jahat telah menjadi bagian dari kepercayaan penduduk Gedangan. Hal tersebut memperkuat kesan bahwa kelompok penjajah merupakan musuh bersama yang harus dihindari.

Tokoh-tokoh dalam kelompok penjajah juga digambarkan sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya karena membohongi rakyat. Hal ini terlihat dari awal kedatangan para pangreh di desa Gedangan untuk menyita tanah. Mereka telah menjanjikan waktu seminggu bagi para penduduk untuk pindah. Akan tetapi, rumah-rumah penduduk sudah dirusak lebih dulu sebelum batas waktu berakhir. Penjajah yang digambarkan melakukan tipu daya juga ditunjukkan dari pengingkaran atas janji mengenai ganti rugi atas tanah dan rumah penduduk. Namun, ganti rugitersebut ternyata tidak dipenuhi pemerintah Belanda.

Tipu daya yang dilakukan kelompok penjajah membuat mereka tidak mendapatkan kepercayaan kelompok pesantren. Rasa tidak percaya tersebut membuat kecurigaan semakin besar bahwa kelompok penjajah adalah penindas yang hanya memikirkan kepentingannya. Tipu daya menjadi strategi penjajah untuk membodohi dan menindas rakyat. Sikap yang demikian membuat mereka menjadi musuh bersama kelompok pesantren. Hal ini membuat keputusan untuk melawan kelompok tersebut semakin kuat.

Untuk memperkuat narasi kelompok penjajah sebagai musuh bersama, peliyanan yang didasarkan pada perbedaan identitas juga menjadi hal yang penting. Kelompok penjajah, terutama orang-orang Belanda yang kemungkinan besarnya bukan Islam, diposisikan berlawanan dengan kelompok pesantren. Sentimen agama dinarasikan secara kuat dalam novel *PpKP*. Perbedaan keyakinan yang digambarkan melalui panggilan kafir terhadap penjajah menjadi cara pandang 'kita' kelompok pesantren terhadap 'liyan' kelompok penjajah sebagai musuh bersama.

Pandangan meliyankan kelompok penjajah melalui kepercayaan yang berbeda dari kelompok pesantren menjadi hal yang efektif untuk menumbuhkan semangat perlawanan, selain karena adanya tindakan penindasan oleh penjajah. Namun, pandangan demikian juga menimbulkan bias. Hal ini dikarenakan kelompok penjajah bukan hanya terdiri dari orang-orang Belanda yang

notabenehnya bukanlah orang muslim, tapi juga pemerintah daerah yang kemungkinan besar juga muslim.

*Ya, Kang Lurah adalah orang gubernemen. Demikian pula saudara-saudara polisi. Dengan demikian antara saudara-saudara dan orang-orang pribumi terpisah oleh jurang yang dalam, tak ada lagi ikatan batin. Saudara-saudara tak mungkin bisa menangis melihat penderitaan mereka walau saudara-saudara segolongan dan sebagian dari mereka juga<sup>10</sup>*

Kutipan di atas merupakan perkataan Kiyahi Mukmin yang ditujukan pada lurah desa Gedangan. Dari kutipan tersebut terlihat bahwa sebenarnya elite pemerintah daerah dianggap sebagai golongan penduduk Gedangan sebelumnya. Namun, sikap politis lurah dan pendukung *gubernemen* yang lain membuat mereka dianggap sebagai kelompok penjajah. Mereka dianggap sebagai kelompok penjajah karena mereka lebih mementingkan kepentingan *gubernemen* daripada nasib saudara-saudaranya sendiri.

Penggambaran mengenai kelompok penjajah yang juga terdiri dari penduduk-penduduk lokal yang kemungkinan juga beragama Islam menimbulkan bias. Hal tersebut dikarenakan sebutan kafir yang digunakan oleh kelompok pesantren terhadap seluruh kelompok penjajah tidak tepat. Kafir merupakan pengkategorian dari sudut pandang agama Islam yang melihat orang lain dengan kepercayaan berbeda dan bukan bagian dari kelompoknya. Dengan kata lain, kafir adalah bentuk peliyanan kaum muslim terhadap kaum agama lain. Sementara itu, permasalahan kolonial yang terjadi di desa Gedangan pada dasarnya adalah perampasan hak tanah dan bangunan milik penduduk, bukan masalah agama. Sebutan kafir tidak tepat digunakan untuk melihat permasalahan kolonial yang terjadi di desa Gedangan, sehingga menimbulkan bias. Pandangan bias dalam novel tersebut menunjukkan adanya pergeseran isu dalam masalah kolonial. Masalah awal yang berupa perebutan wilayah geografis tertentu berubah menjadi masalah kepercayaan. Hal tersebut muncul karena adanya politik identitas yang digunakan oleh kelompok pesantren untuk melawan kelompok penjajah.

Kedatangan penjajah tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Gedangan, tetapi juga pandangan keagamaan mereka. Meskipun sebelum penjajah datang agama Islam telah digambarkan berpengaruh di segala sisi kehidupan termasuk urusan publik, namun agama lebih difokuskan pada kegiatan ritual. Setelah kedatangan penjajah, agama dalam kaitannya dengan urusan publik menjadi dominan di desa Gedangan. Oleh karena itu, wacana-wacana agama yang beredar di masyarakat Gedangan kemudian lebih mengarah

---

<sup>10</sup> Djamil Suherman, *Pejuang-pejuang Kali Pepe* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 82.

pada narasi resistensi terhadap penjajahan.

Wacana-wacana tersebut berkembang seiring dengan kesadaran mengenai adanya tindakan penindasan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh dalam kelompok pesantren diposisikan menjadi korban akibat penindasan kelompok penjajah. Di sisi lain, kelompok pesantren jugadinarasikan sebagai pahlawan karena mereka berjuang membela agama. Dalam upaya perlawanan tersebut, wacana-wacana pengetahuan dan kepercayaan dalam agama Islam, sepertimembela agama, *jihad*, *syahid* dll. berkembang di kelompok pesantren.

Perlawanan terhadap penjajahan muncul akibat adanya kesadaran bersama mengenai penindasan yang dialami oleh warga desa Gedangan. Penulis novel menggambarkan bahwa kesadaran tersebut tidak timbul dengan sendirinya. Kelompok pesantrenlah yang pertama-tama menerangkan pada penduduk Gedangan bahwa tindakan kolonial merupakan sebuah penindasan.

Dalam novel tersebut diceritakan bahwa seorang penduduk desa Gedangan tidak tahu jika mereka punya hak ganti rugi atas tanah dan rumah yang diambil oleh penjajah. Lalu putra Kiyahi Mukmin menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok penjajah merupakan suatu penindasan. Dengan adanya kesadaran mengenai penindasan, kelompok pesantren beserta penduduk Gedangan kemudian memosisikan diri sebagai korban. Mereka adalah korban dari tindakan kolonial seperti perampasan tanah dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Mereka merasakan adanya kerugian dari kebijakan Belanda baik itu materi, fisik, maupun moral. Mereka merasa tidak mendapatkan ketidakadilan karena pemerintah Belanda mengorbankan kehidupan rakyat demi kepentingan para elite. Dengan demikian, kelompok mereka adalah kaum yang dikorbankan.

Pada awal kedatangan penjajah, belum ada pihak yang mengorganisir gerakan rakyat. Meskipun di desa Gedangan telah terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah, namun skala perlawanan tersebut bersifat individu. Pihak pesantren, yaitu kiai adalah orang pertama yang memobilisasi massa. Sebagai pemimpin pesantren sekaligus pemimpin spiritual masyarakat, ia memegang legitimasi dan kepercayaan dari penduduk Gedangan. Hal ini ditunjukkan dari musyawarah yang dilakukan pihak pesantren dengan penduduk Gedangan. Pihak pesantren mengawali keputusan untuk melakukan perlawanan. Keputusan tersebut mempengaruhi masyarakat Gedangan untuk turut serta melakukan perlawanan. Dari proses musyawarah tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki kekuatan mempengaruhi dan memobilisasi massa.

Selain menjadi korban dari kebijakan Belanda yang merugikan materi dan fisik seperti kehilangan tanah dan mendapatkan kekerasan fisik, kelompok pesantren juga merasakan kerugian moral. Perasaan ini didorong oleh perasaan

keagamaan mereka yang terancam. Posisi sebagai korban yang terancam kehidupan agamanya menimbulkan keinginan untuk menyelamatkan agamanya dari kaum penjajah. Oleh karena itu, perlawanan merupakan hal penting sebagai upaya penyelamatan agama. Mereka menganggap bahwa mempertahankan pesantren terhadap penjajahan merupakan usaha untuk mempertahankan agama Islam.

Dalam novel *PpKP*, digambarkan bahwa proses timbulnya kesadaran bersama mengenai penindasan hingga pilihan untuk melawan kolonial tidak terlepas dari peran pesantren. Baik kiai dan santri-santrinya adalah tokoh-tokoh yang mengkoordinir seluruh warga Gedangan yang merasa senasib. Hal tersebut menggambarkan bahwa peran kelompok dengan identitas agama yang kuat menjadi representasi perlawanan yang utama. Agama menjadi politik identitas kelompok pesantren untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingannya. Selain dinarasikan sebagai korban, kelompok pesantren juga dinarasikan sebagai pahlawan. Pahlawan dalam novel *PpKP* digambarkan sebagai orang yang membela hak-haknya dan membela agama Allah. Maka, narasi-narasi mengenai kepahlawanan dalam kelompok pesantren didukung dengan narasi agama.

Dalam novel tersebut digambarkan bahwa orang-orang yang berjuang bersama melawan penjajah adalah pahlawan. Citra tokoh-tokoh pesantren sebagai pahlawan dibangun dari perlawanan yang mereka lakukan. Orang yang meninggal karena melawan penjajahan akan dianugerahi sebagai seorang pahlawan yang mati *syahid*, mati dalam keadaan mulia. Jika meninggal dalam keadaan *syahid*, mereka percaya akan mendapatkan surga. Narasi tersebut selalu diulang-ulang di dalam kelompok tersebut.

Dalam novel *PpKP*, kelompok pesantren menggunakan narasi agama sebagai legitimasi perlawanan atas penindasan yang dilakukan oleh kelompok penjajah. Pengetahuan dan kepercayaan di dalam agama Islam menciptakan narasi yang membuat kelompok pesantren melawan penjajah. Narasi tersebut antara lain, menegakkan agama Islam, jihad, syahid, memerangi kafir, dll. Narasi-narasi tersebut mengarah pada perlawanan kelompok penjajah yang dirasa mengancam agama Islam. Memiliki musuh bersama yang dianggap ingin memerangi agama Islam membuat kelompok pesantren mendapatkan bantuan-bantuan dari luar Gedangan. Atas nama agama, mereka bersatu untuk melawan penjajahan. Mereka menjadi koalisi untuk tujuan yang sama, yaitu menegakkan agama Islam. Kelompok ini percaya bahwa penjajah adalah orang-orang yang mengancam kehidupan dan agama Islam, sehingga melawan penjajah sama dengan melawan musuh agama Islam. Pada akhirnya, kelompok pesantren meyakini bahwa melawan penjajah sama dengan membela Islam, artinya membela kebenaran.

Hal ini juga didukung dengan doktrin-doktrin mengenai kemuliaan orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka percaya mengenai kematian yang *syahid*, sehingga mereka tidak gentar di dalam peperangan melawan penjajah. Dalam medan perang, kata-kata Sahid, jihad, dan sabil terus menerus diulang-ulang sebagai bentuk penguatan mental kelompok pesantren untuk berani berjuang di jalan Allah.

“Perang!”

“Sabil”

“Syahid”

“Ya Allah, ridhailah jihad kami. Kami berjihad di atas jalan-Mu!”<sup>11</sup>

Meskipun politik identitas yang digunakan kelompok pesantren bertujuan untuk melawan ketidakadilan, namun hal itu juga dapat mengarah pada keburukan. Misalnya, tumbuh stereotip tertentu yang digunakan untuk menyebut kelompok lain, seperti sebutan kafir untuk kelompok penjajah. Sebutan kafir yang disematkan untuk seluruh anggota kelompok penjajah tidak sesuai dengan pertimbangan kemungkinan beragamanya kepercayaan dalam kelompok tersebut.

Hal buruk lain akibat politik identitas yang digambarkan dalam novel *PpKP* adalah tindakan pembinasaaan dan balas dendam. Di akhir cerita, Umar menjadi satu-satunya tokoh yang masih hidup setelah pertempuran melawan penjajah terjadi. Ia kemudian membalas dendam pada pangreh dan polisi yang dianggap berada di pihak Belanda. Ia mendatangi rumah-rumah mereka dan -mengeksesuksi tokoh-tokoh tersebut satu per satu.

Perbuatan yang dilakukan Umar tidak lagi berfokus pada tujuan utama kelompok pesantren, yaitu mempertahankan hak-hak mereka. Ia melakukan pembinasaaan dengan tujuan balas dendam, sehingga ia membunuh orang-orang yang dianggap bertanggungjawab pada kematian orang-orang di kelompoknya. Ia mengejar siapa saja yang dianggap mendukung pemerintah Belanda, bahkan di luar arena peperangan.

Kelompok pesantren memanfaatkan politik identitasnya untuk melawan kelompok penjajah. Kelompok identitas berbasis agama menciptakan narasi-narasi perlawanan dengan menggunakan pengetahuan dan kepercayaan tentang agama Islam. Perlawanan sendiri terjadi akibat munculnya kesadaran mengenai ketertindasan yang dirasakan bersama akibat penjajahan.

Perlawanan dan penindasan tersebut memunculkan pemosisian tertentu baik bagi kelompok penjajah dan kelompok pesantren. Kelompok penjajah

---

<sup>11</sup> Ibid., 56.

ditempatkan sebagai musuh, sedangkan kelompok pesantren diposisikan sebagai korban sekaligus pahlawan. Namun demikian, politik identitas tidak selalu digunakan secara ideal seperti melawan penindasan untuk memperoleh hak-haknya kembali. Politik identitas juga bisa mengarah pada sisi yang buruk, misalnya stereotip atau generalisasi umum terhadap suatu kelompok dan pembinasaaan.

#### D. HUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ISLAM DENGAN PENGUASA

*Pejuang-pejuang Kali Pepe* merupakan novel yang menceritakan tentang perjuangan kelompok Islam dalam melawan penjajah Belanda yang terbit pada tahun 1984. Jika dilihat dari waktu terbitnya novel ini, saat itu Indonesia berada pada era Orde Baru. Pada masaitu, persoalan mengenai politik identitas kelompok Islam menguat. Adanya permasalahan mengenai politik identitas di dalam konteks Orde Baru memerlukan pembahasan tersendiri. Pembahasan ini penting untuk melihat hubungan kelompok Islam dengan rezim penguasa yang melahirkan politik identitas. Hal ini tidak terlepas dari politik identitas kelompok Islam yang menjadi isu dominan dalam novel *PpKP*.

Isu identitas yang muncul dalam karya sastra berhubungan dengan identitas diri pencipta. Said mengatakan bahwa politik, institusi, dan ideologi berpengaruh terhadap karya yang dihasilkan oleh pencipta<sup>12</sup>. Pengetahuan atau pun kepercayaan pengarang memberipengaruh terhadap karya yang dibuatnya.

Era Orde Baru ditandai dengan jatuhnya pemerintahan presiden Soekarno yang digantikan oleh Soeharto pada tahun 1966. Dalam sejarah, tercatat bahwa Soeharto menduduki kursi presiden di Indonesia terlama, yaitu sejak 1966—1988. Di masa ini, presiden Soeharto dikenal dengan gaya pemerintahannya yang militeristis dan Otoriter. Dari latar belakangnya, Soeharto merupakan presiden dari kalangan militer. Ia juga mendapatkan dukungan besar dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), selama menjadi kepala pemerintahan. Pada era ini, kedudukan militer sangat kuat karena militer diposisikan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sekaligus kekuatan politik melalui dwifungsi ABRI. Adanya dwifungsi ABRI membuat mayoritas jabatan pemerintahan dipegang oleh personel ABRI<sup>13</sup>

Pembangunan merupakan agenda utama pemerintah Orde Baru. Demi

<sup>12</sup> Said dan Fawaid, *Orientalisme: Mengugat Hagemoni Barat dan menduduki Timur sebagai subjek*, 19.

<sup>13</sup> John Musa Renhoard, “Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi,” *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 123.

melaksanakan pembangunan, pemerintah memprioritaskan keamanan dan stabilitas sosial dan politik. Ideologi pembangunan dan tercapainya stabilitas ini membuat pemerintahan Orde Baru menjadi rezim politik yang kuat dan represif. Represi menjadi unsur penting sebagai usaha memonopoli kekuasaan dengan mengandalkan kekuatan sosial politik yang mampu merusak dan memecah. Orde Baru mampu merekayasa kehidupan sosial politik masyarakat.<sup>14</sup> Pemerintahan di bawah kendali presiden Soeharto yang didukung oleh militer mampu menggunakan tekanan maupun cara-cara kekerasan untuk menciptakan situasi yang dianggap stabil dan sesuai untuk iklim pembangunan.

Prioritas terhadap tercapainya keamanan dan stabilitas inilah yang membuat pemerintah berusaha menghilangkan kekuatan oposisi-oposisi yang dianggap mengancam kekuasaan. Penghilangan kekuatan oposisi telah terlihat sejak masa tumbanganya Orde Lama, yaitu pemberantasan terhadap semua orang yang dipandang sebagai simpatisan Partai Komunis. Selain komunis, kekuatan oposisi lain yang dianggap mengancam pemerintahan Orde Baru adalah kelompok Islam.<sup>15</sup>

Meskipun bukan partai pemenang PEMILU tahun 1971, kelompok Islam dianggap menjadi ancaman bagi pemerintahan Orde Baru. Pada tahun itu, partai pendukung pemerintah, yaitu Golkar berhasil memenangkan suara dominan sebesar 62,8%. Namun, NU memperlihatkan kesolidan partai Islam dengan menempati posisi selanjutnya dengan 18,67%. Hal ini dirasa akan mengancam kekuatan Golkar sebagai pendukung pemerintah.<sup>16</sup>

Meskipun Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, namun pada era Orde Baru terjadi pembatasan-pembatasan berpolitik bagi kelompok Islam. Gerakan Islam tersudutkan oleh tekanan-tekanan pemerintah yang menyebabkan gerakan Islam mengalami krisis. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, rezim Orde Baru melakukan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok Islam politis dan menindas segala bentuk aktivisme Islam politik.<sup>16</sup>

Pada dekade ini, aktivis politik muslim menjadi persentase terbesar tahanan politik. Pemerintah pada saat itu menganggap mereka sebagai “ekstremis kanan”<sup>17</sup>. Pada masa ini juga terjadi pelarangan-pelarangan politik kelompok Islam seperti tidak diizinkan nya parpol (partai politik) Masyumi berdiri kembali,

---

<sup>14</sup> Okrisal Eka Putra, “Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru,” *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 198.

<sup>15</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, “Political Islam and religious violence in post-new order Indonesia,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2015, 3.

<sup>16</sup> Ariel Heryanto, *Identitas dan kenikmatan* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), 45.

<sup>17</sup> Ibid., 44.

menyederhanakan parpol aliran Islam dalam partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1970, dan memberlakukan azas tunggal Pancasila bagi semua parpol dan ormas (organisasi masyarakat) pada tahun 1985. Dalam pengaturan politik yang demikian, depolitisasi Islam terjadi.<sup>18</sup>

Hubungan yang fluktuatif antara Islam dan negara sepanjang Orde Baru menimbulkan Islam politik sebagai respons terhadap situasi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>19</sup> Beberapa kebijakan represif menimbulkan efek negatif pada masa depan Islam yang terlihat jelas pada 1980-an. Penetapan Azas Tunggal Pancasila oleh pemerintah mendapat reaksi keras dari komunitas muslim. Puncak reaksi terjadi pada kerusuhan Tanjung Priok, area pelabuhan Jakarta, Agustus 1984 yang menyebabkan seribuan muslim meninggal di tangan tentara Indonesia dan beberapa tokoh prominèn ditangkap, termasuk dua dari anggota 50 kelompok petisi. Insiden yang terjadi selama tahun 1984—1985 mengancam stabilitas pemerintah, seperti peledakan BCA di Jakarta, candi Borobudur di Yogyakarta, dan markas angkatan laut di Cilandak, Jakarta, menyebabkan kelompok muslim dituduh bertanggung jawab terhadap dua ledakan awal. Banyak pendapat menyatakan bahwa insiden-insiden tersebut tidak berhubungan. Meskipun demikian, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan reaksi terhadap program politik rezim yang memperlihatkan tendensi untuk memusatkan dan mengumpulkan kekuasaan.<sup>20</sup>

Munculnya kekuatan Islam mempengaruhi situasi politik masa Orde Baru, terutama di akhir periode. Singkatnya, bisa dikatakan bahwa tumbangnya rezim Soeharto merupakan konsekuensi logis dari politisasi yang tidak memihak terhadap Islam dalam arti yang sesungguhnya, dan tidak memihak kesejahteraan masyarakat Indonesia<sup>21</sup>. Munculnya politik identitas Islam pada masa Orde Baru adalah reaksi yang ditimbulkan dari represi yang ditujukan pada kelompok Islam. Dalam perkembangannya, pemerintah Orde Baru di masa menjelang Reformasi menyadari kekuatan kelompok Islam. Hal ini membuat pemerintah di masa itu membuat langkah-langkah yang lebih akomodatif terhadap kelompok Islam.

Posisi umat Islam dan pemerintah Orde Baru periode awal berada pada posisi berhadapan (*vis a vis*), ditambah dengan berbagai kasus yang semakin merenggangkan hubungan tersebut, sebutlah kasus Tanjung Priok, Lampung, Peledakan Borobudur, dan lain-lain. Ini terjadi karena orang-orang dekat

<sup>18</sup> Masykur Hakim, "The New Order and Indonesian Islam Politics," *ILMU USHULUDDIN* 3, no. 1 (2016): 23.

<sup>19</sup> Mudhoffir, "Political Islam and religious violence in post-new order Indonesia," 1.

<sup>20</sup> Hakim, "The New Order and Indonesian Islam Politics," 40.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 43.

Soeharto kebanyakan dari kalangan non-muslim dan para jenderal militer masih didominasi oleh golongan anti-Islam. Ini bisa dimaklumi karena umat Islam tidak bisa banyak menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah militer pada masa penjajahan. Akhirnya, tokoh-tokoh yang berpendidikan tinggi lebih banyak didominasi oleh kalangan non-muslim.<sup>22</sup> Hubungan yang tidak harmonis antara kelompok Islam dengan Kristen, Cina, maupun Abangan dalam situasi politik negara telah terjalin melalui sejarah yang cukup panjang.

Fakta bahwa mayoritas populasi di Indonesia adalah muslim tetapi mereka yang mengontrol kekuasaan didominasi oleh Abangan dan Kristen juga menjadi alasan kemunculan oposisi politik dari kelompok muslim. Meskipun demikian, secara historis eksponen muslim sejak periode kolonial telah mengajukan kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan politik.<sup>23</sup>

Dapat dikatakan bahwa hubungan kelompok Islam dengan penguasa berlangsung tegang sejak masa kolonial. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Snouck Horgonje, penasihat pemerintahan Hindia Belanda, melihat Islam dari dua aspek: ritual dan politik. Ia menyarankan untuk memberikan kebebasan penuh pada aspek ritual kaum muslim, namun tidak dalam aspek politik. Saran tersebut ternyata juga diikuti oleh pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Khususnya pada masa Orde Baru yang memberlakukan pelarangan-pelarangan politik, tetapi mendukung kegiatan ritual seperti pendirian masjid atau mendukung program dakwah.<sup>24</sup>

Namun demikian, hubungan antara Islam dan negara pada akhir masa Orde Baru mengalami perubahan. Munculnya kelas menengah muslim yang baik dalam lini ekonomi, sosial, dan politik membuat pemerintahan mengatur ulang strategi politiknya. Ketikakaum intelektual Islam sudah sangat kuat, pemerintah mengubah strategi politik konfrontatifnya, yang berlangsung sejak awal Orde Baru sampai pertengahan 1980-an, menjadi akomodatif dalam merangkul dan mendukung kalangan Islam politik.<sup>25</sup> Pada akhir masa Orde Baru, kelompok Islam telah banyak yang mengisi kelas-kelas menengah, sehingga membuka kesempatan-kesempatan lain, termasuk berpolitik.

Tumbuhnya kaum terpelajar dan kelompok intelegensia merupakan salah satu perkembangan penting di lingkungan muslim-santri pada masa Orde Baru. Perkembangan ini didorong oleh kebijaksanaan negara yang memberikan ruang

---

<sup>22</sup> Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru," 187.

<sup>23</sup> Mudhoffir, "Political Islam and religious violence in post-new order Indonesia," 3.

<sup>24</sup> Hakim, "The New Order and Indonesian Islam Politics," 23.

<sup>25</sup> Renhoard, "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi," 124.

lebih besar bagi masyarakat luas untuk menduduki bangku-bangku sekolah. Keadaan ini berbeda sekali dengan politik pendidikan masa pemerintahan kolonial. Dalam masa penjajahan, mereka yang memiliki peluang paling besar memperoleh pendidikan adalah anak dari kalangan bangsawan, priayi, dan mereka yang beragama Kristen/Katolik yang mendapat subsidi kuat dari gereja.<sup>26</sup>

Situasi politik yang didominasi oleh pemerintah yang berkuasa membuat kelompok Islam merasa terpinggirkan, termasuk hak dalam berpolitik. Oleh karena itu, kelompok ini memperkuat politik identitasnya untuk merespons situasi yang tidak menguntungkan mereka.

Djamil Suherman (1924—1985) adalah seorang pengarang yang memiliki latar belakang agama Islam yang kental. Pada masa kanak-kanak ia hidup di lingkungan pesantren di Kedungpring, Jawa Timur dan memperoleh pendidikan agama Islam langsung dari ayahnya. Sebelum menamatkan pendidikan formal, ia juga mengikuti pendidikan di pesantren Mufidah Muhammadiyah, Surabaya. Pendidikannya terbilang tinggi karena berhasil menamatkan sekolah rakyat di Surabaya (1937), sekolah menengah pertama di Kediri (1944), sekolah menengah atas di Surabaya (1950), dan Akademi Administrasi Negara di Bandung (1965).

DS memiliki pengalaman dalam dunia militer. Ia pernah menjadi tentara dengan pangkat sersan mayor I yang bertugas di Divisi VI Kediri (1947—1950) pada masa revolusi. Ia juga pernah menjadi guru agama sekolah rakyat di Surabaya (1950--1951). Setelah itu, ia menjadi pegawai Pos dan Telekomunikasi di Surabaya, Palembang, dan Bandung.

Dalam dunia kepengarangan, DS menjadi pengarang yang aktif dengan menulis berbagai karya sastra seperti cerpen, puisi, hingga novel. Karya sastranya dimuat di berbagai majalah dan surat kabar, antara lain *Indonesia*, *Siasat*, *Kisah*, *Budaja*, *Mimbar Indonesia*, *Nasional*, *Minggu Pagi*, *Horison*, dan *Sastra*. Beberapa judul cerpennya yang dimuat di berbagai surat kabar dan majalah antara lain: “Antara Menara dan Geredja” (1953), “Dari Lagu ke Rambut” (1954), “Subuh Terachir” (1954), “Pamanku” (1955), “Sebuah Kepala” (1955), “Si Bendul Anak Ketjapi” (1955), “Djadi Santri” (1956), “Langgar dan Kjahi Kami” (1956), “Main Gambus” (1956), “Malam Muludan” (1956). Di samping itu, beberapa judul puisinya yang dimuat di berbagai media cetak antara lain: “Malam jang Kehilangan” (1953), “Siul Burung Malam” (1957), “*At-Takwir*-Bila Matahari Dibalikkan” (1960) “*Al Ghasijah*-Huru Hara” (1962) “Persahabatan” 1969, “Kepada Pemimpin” (1962). Ia juga memiliki kumpulan cerpen dan puisi yang dibukukan antara lain Umi Kulsum (1963) dan *Nafiri* (1983). Dari karya-

<sup>26</sup> Putra, “Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru,” 187.

karyanya tersebut, DS digolongkan sebagai pengarang keagamaan karena terdapat kecenderungan karyanya mengangkat masalah spiritual seperti di dalam *Perjalanan ke Akhirat* dan *Umi Kulsum*, selain itu cerpen-cerpennya banyak mengangkat tema pesantren.<sup>27</sup>

Di antara banyaknya cerpen dan puisi yang ia ciptakan, di tahun-tahun akhirmenjelang kematiannya, terbit tiga novel dengan tema yang serupa, *Pejuang-pejuang Kali Pepe* (1984), *Sarip Tambak Oso* (1984), *Sekerah* (1985). Dalam ketiga novel tersebut, DS mengambil latar masa kolonialisme Belanda. *PpKP* menceritakan perjuangan kelompok pesantren dalam menghadapi penjajah Belanda yang merampas tanah dan tempat tinggal penduduk desa Gedangan. *Sarip Tambak Oso* menceritakan tentang lelaki bernama Sarip yang melawan tentara Belanda yang dibantu dengan kekuatan istimewa ibunya. Kemudian *Sakerah* berkisah tentang seorang mandor pabrik tebu yang dituduh menipu dan membawa uang pabrik. Selain persamaan latar penjajahan Belanda, ketiga novel ini juga menghadapi tokoh utama yang berasal dari kalangan Islam tradisional dengan elite lokal yang mendukung Belanda. Selain itu, akhir dari ketiga cerita dalam novel-novel tersebut adalah kematian tokoh utama.

Selain menghadapi orang-orang Belanda, ketiga novel juga menunjukkan konflik yang terjadi antara kaum muslim tradisional yang tinggal di pedesaan dengan pejabat-pejabat lokal yang berpihak pada Belanda. Dalam karya-karya tersebut, DS menggambarkan bahwa penindasan tidak hanya dilakukan oleh orang Belanda saja, tetapi juga oleh sesama kaumnya yang memiliki posisi politik lebih tinggi.

DS merupakan salah satu kaum intelektual muslim dari kalangan menengah yang mengalami pemerintahan di bawah Orde Baru. Ia berlatar belakang pesantren, pendidikan tinggi, dan berada di posisi kelas menengah. DS memiliki kesadaran bahwa kelompok Islam, terutama pesantren pada era tersebut menjadi kelompok yang terpinggirkan. Kelompok tersebut kurang mendapatkan akses pendidikan formal, ekonomi, dan politik. Selain negara yang tidak memberi perhatian terhadap kelompok ini, kaum pesantren juga dianggap sebagai kelompok yang kolot dan tertinggal. Oleh karena itu, seperti halnya muslim yang lain, DS memiliki harapan adanya perubahan situasi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari kecenderungan karyanya. Dalam karya-karyanya, DS berusaha membangun narasi mengenai kelompok Islam, khususnya kalangan pesantren. Kecenderungan karyanya berbeda dari karya-karya lain yang pada masa itu karya dengan tema pesantren tidak banyak terbit.

---

<sup>27</sup> Admin, "Artikel 'Djamil Suherman' - Ensiklopedia Sastra Indonesia," 2021, [http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Djamil\\_Suherman](http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Djamil_Suherman).

*PpKP* adalah salah satu novel yang bertema pesantren. Selain penggambaran kelompok pesantren sebagai korban atas tindakan penjajahan Belanda, kelompok ini juga digambarkan dari sisi heroiknya melalui perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan. Narasi ini penting untuk mengangkat kelompok ini sebagai pihak yang turut berjasa dalam melawan penjajahan. Sebagai pihak yang berjuang dalam kemerdekaan, sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik di dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, kelompok muslim sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia juga berhak turut serta berpolitik bersama dengan kelompok politik lainnya dan terbebas dari diskriminasi. Hal ini menjadi keresahan pengarang karena pada masa Orde Baru, Islam kurang mendapat tempat dalam berpolitik ataupun pembatasan dalam hal lainnya.

Represi dan diskriminasi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru menempatkan kelompok Islam di posisi yang tidak menguntungkan. Perasaan tertindas menimbulkan gerakan-gerakan berbasis keagamaan, seperti kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat. Narasi mengenai represi dan diskriminasi yang menimbulkan perlawanan juga terdapat dalam novel *PpKP*. Kelompok pesantren digambarkan sebagai korban yang dirampas hak miliknya oleh kelompok penjajah. Dalam novel tersebut, narasi ketidakadilan yang dialami oleh kelompok Islam menimbulkan perlawanan terhadap penjajah.

Dalam novel *PpKP*, tampak bahwa penulis juga mempertentangkan antara identitas tradisional dan modern yang diwakili oleh kelompok pesantren melawan kelompok penjajah. Identitas modern menjadi representasi dari kelompok penjajah yang dapat dilihat dari tujuan tindakan kolonial: mengambil alih tanah penduduk Gedangan untuk dibangun rel. Pembangunan rel kereta api bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi hasil tani penduduk. Namun, keuntungan ekonomi ini menjadi keuntungan bagi kelompok penjajah yang merugikan rakyat Gedangan. Modernisasi yang berorientasi pada pembangunan khususnya infrastruktur juga menjadi narasi penting dalam pemerintahan Orde Baru. Keberlangsungan program pembangunan Orde Baru pada saat itu dinilai tidak memihak rakyat dan hanya menguntungkan elite-elite tertentu. Sebaliknya, dalam novel *PpKP*, pesantren direpresentasikan dengan kaum tradisional. Kelompok ini terdiri dari warga desa Gedangan yang taat melakukan ibadah/ritual dan tradisi pesantren. Tradisi-tradisi kelompok pesantren tersebut tidak digambarkan dalam kelompok penjajah.

Dalam novel tersebut, identitas kelompok pesantren sebagai muslim tradisional adalah identitas yang tidak dimiliki atau berbeda dari kelompok penjajah. Sebagai pihak yang bukan kelompok muslim, penjajah dianggap sebagai kaum kafir, yaitu orang yang bukan beragama Islam. Di samping itu, tidak ada penjelasan yang menunjukkan apa agama atau tradisi para pemerintah desa

Gedangan. Sebagai kelompok yang digambarkan berlawanan dengan kelompok pesantren dan tidak memiliki tradisi-tradisi pesantren, para pejabat pemerintahan kolonial dapat diasumsikan sebagai Abangan atau Kristen.

Penggolongan-penggolongan berdasarkan kepercayaan juga terjadi pada pemerintahan masa Orde Baru. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jabatan politik pada masa itu banyak diisi oleh kaum Abangan ataupun Kristen. Baik Abangan maupun Kristen bukanlah kelompok pesantren. Mereka tidak memiliki tradisi Islam tradisional seperti halnya milik kelompok pesantren. Dalam novel *PpKP*, penanda identitas ini dipakai untuk membedakan tokoh-tokoh yang jahat dan tokoh-tokoh yang baik. Orang-orang Islam tradisional digambarkan sebagai tokoh-tokoh baik yang tidak memiliki jabatan politis. Sebaliknya, penjajah yang diasumsikan sebagai Abangan atau Kristen adalah orang-orang yang jahat yang memiliki kekuasaan politik. Baik di novel *PpKP* maupun di masa Orde Baru, Islam menjadi penanda identitas yang membedakan antara anggota kelompok pesantren dengan anggota di luar kelompoknya. Penanda identitas agama digunakan sebagai pembeda karena adanya represi dari penguasa terhadap kelompok Islam.

## **E. Kesimpulan**

Analisis terhadap novel *PpKP* menunjukkan bahwa identitas agama menjadi hal yang penting untuk mengidentifikasi diri dan liyan dalam masyarakat pesantren. Identitas agama Islam digunakan kelompok tersebut untuk mengidentifikasi anggota-anggota kelompoknya melalui identitas mutual, seperti kepercayaan, tradisi, ritual, dll. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mempunyai identitas mutual seperti milik kelompok pesantren, mereka dianggap sebagai liyan. Liyan yang menjadi musuh bersama kelompok pesantren adalah kelompok penjajah. Tokoh-tokoh dalam kelompok penjajah tidak digambarkan memiliki kepercayaan, tradisi, maupun ritual yang sama dengan kelompok pesantren. Kelompok tersebut juga digambarkan dengan anonim, sehingga hanya disebutkan jabatannya saja, seperti lurah, camat, atau polisi. Penggambaran identitas kelompok pesantren dan kelompok penjajah yang saling berlawanan merupakan penggambaran khas oposisi biner Barat dan Timur dalam orientalisme. Penggambaran kelompok pesantren merepresentasikan dunia Timur yang spiritual, sedangkan kelompok penjajah adalah Barat yang material.

Penggambaran yang cenderung dualis ini menunjukkan bahwa pengarang mereduksi narasi relasi antara kelompok Islam dengan penjajah yang sebenarnya beragam. Hal ini juga tercermin dari adanya bias penggolongan kelompok pesantren yang menyebut kelompok penjajah sebagai kafir. Padahal, beberapa pendukung Belanda adalah pejabat lokal seperti mereka.

Dalam novel *PpKP*, selain sebagai pembeda, identitas agama juga digunakan kelompok pesantren sebagai upaya resistensi terhadap penjajahan. Dari identitas agama tersebut, mereka menciptakan narasi-narasi perlawanan. Dengan menggunakan pengetahuan dan kepercayaan agama Islam, kelompok pesantren menolak penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Penindasan tersebut memosisikan kelompok pesantren sebagai korban sekaligus pahlawan, sedangkan kelompok penjajah adalah musuh. Selain berfungsi sebagai perlawanan, politik identitas juga menimbulkan stereotip seperti kafir serta memicu upaya pembinasaaan terhadapkelompok lain.

Masa penciptaan novel *PpKP* juga mempengaruhi pandangan penulis yang tampak dalam karyanya. Pada masa itu, Orde Baru sebagai pemerintah yang berkuasa menempatkan kelompok Islam dalam posisi yang tidak menguntungkan. Peta politik di masa itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan adalah Kristen dan Abangan. Oleh karena itu, kelompok Islam tidak mendapatkan tempat di berbagai bidang, terutama politik. Situasi yang demikian menimbulkan adanya politik identitas dan pergerakan berbasis keagamaan. Fenomena yang demikian ditangkap oleh Djamil Suherman yang melalui karyanya.

Dalam situasi yang demikian, alih-alih mengusung nasionalisme--yang merupakan wacana dominan anti-kolonial—, pengarang memilih wacana agama untuk melawan wacana kolonial. Hal ini memperlihatkan bahwa pengarang ingin menunjukkan posisi politis kelompok Islam di dalam kehidupan negara. Penulis menganggap bahwa umat Islam ikut memiliki jasa terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

## F. Daftar Pustaka

- Admin. “Artikel ‘Djamil Suherman’ - Ensiklopedia Sastra Indonesia,” 2021. [http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Djamil\\_Suherman](http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Djamil_Suherman).
- Ali, Muhamad. “Islam dan Penjajahan Barat: Sejarah Muslim dan Kolonialis-Eropa-Kristen, Modernisasi Sistem Organisasi, Politik, Hukum, Pendidikan di Indonesia dan Melayu.” *Jakarta: Penerbit Serambi*, 2017.
- Hakim, Masykur. “The New Order and Indonesian Islam Politics.” *ILMU USHULUDDIN* 3, no. 1 (2016): 23–44.
- Heryanto, Ariel. *Identitas dan kenikmatan*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. “Political Islam and religious violence in post-new order Indonesia.” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2015, 1–22.

- Nicole, Goulet. "Study of Religion: Dissecting Orientalism, Nationalism, and Gender Using Postcolonial Theory." *Religion Compass* 5, no. 10 (2011).
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. *Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Putra, Okrisal Eka. "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru." *Jurnal Dakwah* 9, no. 2 (2008): 185–201.
- Renhoard, John Musa. "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 115.
- Said, Edward W, dan Achmad Fawaid. *Orientalisme: Mengugat Hagemoni Barat dan menduduki Timur sebagai subjek*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Sarup, Madan. *Identity, Culture and the Postmodern World*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.
- Suherman, Djamil. *Pejuang-pejuang Kali Pepe*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.